

**TESIS**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN MELALUI DANA  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PELABUHAN  
INDONESIA IV (PERSERO) PADA ALOKASI BANTUAN PENDIDIKAN  
DASAR SEMBILAN TAHUN KOTA MAKASSAR**

**THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION AND PROGRAM POLCY OF PT.  
PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) ON THE ALLOCATION OF  
NINE-YEAR BASIC EDUCATION ASSISTANCE OF MAKASSAR OF  
MAKASSAR CITY**

Disusun dan diajukan oleh

**ARNI**

**E012 18 2 002**



**PROGRAM PASCASARJANA ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**IMPLEMNTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN MELALUI DANA  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PELABUHAN  
INDONESIA IV (PERSERO) PADA ALOKASI BANTUAN PENDIDIKAN  
DASAR SEMBILAN TAHUN KOTA MAKASSAR**

**ARNI**

**E012182002**

**ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM PASCASARJANA ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN MELALUI DANA  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PELABUHAN  
INDONESIA IV (PERSERO) PADA ALOKASI BANTUAN PENDIDIKAN  
DASAR SEMBILAN TAHUN KOTA MAKASSAR**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi**

**Administrasi Publik**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**ARNI**

**Kepada**

**PROGRAM PASCASARJANA ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2020**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN MELALUI  
DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) PADA ALOKASI  
BANTUAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN  
KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

**ARNI**

Nomor Pokok E012182002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **23 Desember 2020**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.  
Nip. 196012311986011005

Pembimbing Pendamping,

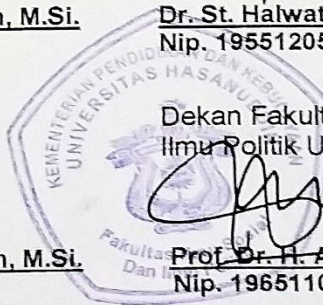
Dr. St. Halwatiah, M.Si.  
Nip. 195512051994032001

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik,

Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.  
Nip. 196012311986011005

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. H. Armin, M.Si.  
Nip. 196511091991031008



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Arni  
Nomor Mahasiswa : E012182002  
Program Studi : Administrasi Publik

Yang menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan ilmiah saya berjudul:

**IMPLEMNTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN MELALUI DANA  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PELABUHAN  
INDONESIA IV (PERSERO) PADA ALOKASI BANTUAN PENDIDIKAN  
DASAR SEMBILAN TAHUN KOTA MAKASSAR**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Desember 2020

Yang menyatakan



## KATA PENGANTAR



*Assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur, penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhana wa ta'ala, pencipta alam semesta atas limpahan rahmat dan nikmat yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "***Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Melalui Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada Alokasi Bantuan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kota Makassar***" sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi Program Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dalam bertindak.

Ucapan terima kasih tak lupa juga penulis ucapkan untuk kedua orang tua penulis, **Samsir** dan **Nadira**. Terima kasih yang sebesar-sebesarannya untuk Ayah dan Ibunda penulis yang telah mendidik dan merawat penulis dari kecil sampai saat ini, hingga penulis bisa menapaki jenjang pendidikan yang lebih layak lagi. Terima kasih untuk setiap perjuangan dan juga do'a dari orang tua penulis, semoga Ayah dan Ibunda penulis dirahmati oleh Allah

SWT, amin dan terima kasih pula kepada kakak saya **Riswan** atas doa dan materi yang telah diberikan kepada penulis. Tidak lupa juga penulis haturkan banyak terima kasih kepada keluarga besar, kerabat serta sahabat dekat penulis lainnya yang selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan tesis dengan cepat.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan Tesis ini dapat disusun dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** Selaku Rektor Unhas beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Bapak **Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para staf dan jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si** selaku Ketua Prodi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.** selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan tesis ini.

5. Bapak **Dr. St. Halwatiah, M.Si.** selaku pembimbing II dan penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan tesis ini.
6. Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si** Bapak **Dr.Badu Achmad, M.Si** dan Ibu **Dr. Gita Susanti, M.Si** selaku dewan penguji dalam ujian tesis ini. Terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan tesis ini.
7. Seluruh **Dosen pengajar Program Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin** yang secara terus menerus memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan kepada penulis selama pendidikan khususnya pengampuh mata kuliah pada semester I sampai III.
8. Seluruh **Staff Pasca Sarjana Administrasi Publik dan staff di lingkup FISIP UNHAS** tanpa terkecuali. Terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
9. Pihak **PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar** atas kesediaannya memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Pihak **Sekolah Islam Terpadu (SIT) Nurul Fikri Makassar, SMPN 24 Makassar** dan **SMP Islam Athirah 1 Makassar** atas kesediaannya memberikan izin untuk melakukan penelitian.



11. Rekan-rekan **Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin** Khususnya angkatan Tahun 2018 dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

12. Teruntuk **Noviandi, Fadil Pradana, Warda Ningsi, Arlisa, Annisa, Fatwa Pawawoi, Muh. Rafli, Sahril, Sahrul, Muh. Rifki, Ryan Arisetiawan** terima kasih atas dukungan, bantuan, semangat dan loyalitas serta kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan kepada penulis.

13. Semua Pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa materi dan non materi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk bantuannya.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu, saran dan kritik dari pembaca yang sehat dan membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap tesis ini memenuhi kriteria dalam kelulusan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 23 Desember 2020

Penulis,

Arni

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	12
3. Manfaat Peneliti.....	12
 <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi Kebijakan Publik .....	13
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2. Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	22
B. Implementasi Kebijakan .....	24

1. Model Implementasi Kebijakan.....	27
C. Corporate Social Responsibility (CSR) .....	39
1. Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR).....	46
2. Bentuk-Bentuk <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> ..	48
3. Model-model <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	50
4. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	52
5. Prinsip-Prinsip <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	54
6. Pendidikan .....	56
D. Penelitian Terdahulu .....	58
E. Kerangka Konseptual .....	60

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	61
B. Desain Penelitian .....	61
C. Lokasi dan Waktu .....	62
D. Informa.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
1. Data Primer.....	63
2. Data Sekunder.....	64
F. Instrumen Penelitian .....	64
G. Teknik Pengolahan Data.....	65
H. Teknik Analisis Data .....	66
I. Keabsahan Data.....	68

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	70
1. Visi & Misi.....	71
2. Nilai .....	72

3. Tugas & Fungsi .....	73
4. Komitmen Perusahaan.....	74
5. Struktur Organisasi .....	75
B. Hasil Penelitian .....	78
1. Isi Kebijakan.....	79
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan .....	79
b. Jenis Manfaat .....	87
c. Derajat Perubahan.....	92
d. Kedudukan Pembuat Kebijakan.....	95
e. Pelaksana Kebijakan .....	100
f. Sumber Daya Yang Terlibat.....	112
2. Lingkungan Implementasi .....	117
a. Kekuasaan, Kepentingan Aktor yang Terlibat.....	117
b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa .....	120
c. Kepatuhan dan Daya Tangkap .....	123

## **BAB V: KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	127
B. Saran.....	131

## **Daftar Pustaka**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahap-tahap Proses Pembuat Kebijakan .....	23
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	58
Tabel 4.1 Program Pelaksanaan CSR .....	101
Tabel 4.2 Bantuan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> pada sekolah di Kota Makassar .....	115

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Keberhasilan Implementasi .....	32
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual .....	60
Gambar 3.1 Struktur Organisasi .....	75

## ABSTRAK

**Arni. E012182002.** *Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Melalui Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada Alokasi Bantuan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kota Makassar* (Dibimbing oleh. Muh. Akmal Ibrahim, dan St. Halwatiah).

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengentahui implementasi kebijakan program *Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) pada bantuan pendidikan dasar Sembilan tahun kota Makassar*, 2) mengetahui Hasil Implementasi program pendidikan melalui dana corporate social responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar pada bantuan Pendidikan Dasar Sembilan tahun Kota Makassar. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Tehnik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program *Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) pada bantuan pendidikan dasar Sembilan tahun kota Makassar* sudah tepat sasaran di lapangan dan sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang telah ditentukan *pertama*, isi kebijakan yang terdiri atas (a) kepentingan yang terpengaruhi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang kota Makassar sebagai pihak pelaksana memiliki kepentingan dalam meningkatkan citra perusahaan, (b) jenis manfaat yang akan dihasilkan Perusahaan harus menjadikan sekolah sebagai partner, (c) perubahan yang diinginkan sebagai penyalur bantuan yang mampu memberikan hasil positif; (d) kedudukan pembuat kebijakan perusahaan belum dapat dilaksanakan secara optimal; (e) siapa pelaksana kebijakan perusahaan itu sendiri, (f) sumber daya yang dihasilkan sudah sepenuhnya menunjang dan *kedua*, lingkungan implementasi dapat dilihat dari aspek (a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat bahwa masing-masing actor menjalankan tugas yang di berikan baik dari pihak sekolah; (b) karakteristik lembaga dan penguasa menjalankan berbagai program atau kegiatan dengan baik (c) keputusan dan daya tangkap Implementor program harus fokus terhadap pencapaian tugas dan mengesampingkan berbagai faktor internal atau kepentingan pribadinya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program pendidikan, Corporate Social Responsibility (CSR).

## **ABSTRACT**

*Arni. E012182002. The Implementation Of Education And Program Polcy Of Pt. Pelabuhan Indonesia Iv (Persero) On The Allocation Of Nine-Year Basic Education Assistance Of Makassar Of Makassar City (Supervised by Muh. Akmal Ibrahim, and St. Halwatiah).*

*This study aims to 1) Determine the implementation of the policy of the Corporate Social Responsibility (CSR) program of PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) on the nine years basic education assistance for the city of Makassar, 2) knowing the results of the implementation of education programs through the corporate social responsibility (CSR) fund of PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar City Branch in the Nine-year Basic Education assistance for Makassar City. This research uses a qualitative approach. Data collection techniques are interviews, observation, literature study and documentation. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation and data verification.*

*The results showed that the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program policy of PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) on the nine years of basic education assistance in the city of Makassar has been on target in the field and has been effective, this can be seen from several predetermined aspects. First, the content of the policy consisting of (a) interests affected by PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar City Branch as the implementing party has an interest in improving the company's image, (b) the types of benefits that will be generated by the company must make the school as a partner, (c) the desired changes as a channel of assistance that is able to provide positive results; (d) the position of the company policy maker has not been implemented optimally; (e) who is the executor of the company policy itself, (f) the resources produced are fully supportive and secondly, the implementation environment can be seen from the aspects (a) the power, interests and strategies of the actors involved, that each actor carries out the assigned task. both from the school; (b) the characteristics of the institution and the authorities running various programs or activities well (c) the decision and the catching power of the program implementer must focus on the achievement of tasks and ignore various internal factors or personal interests.*

*Keywords: Policy Implementation, Education Program, Corporate Social Responsibility (CSR).*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut, kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Menurut Grindle (1980), implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara semakin kompleks. Anggaran yang kecil serta konsentrasi pemerintah yang tersedot ke beberapa persoalan, menyebabkan pemerintah tidak akan mampu mengatasinya sendirian. Karenanya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dengan berbagai elemen bangsa khususnya dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung jawab sosial perlu digalakkan.

Pemerintah dalam melaksanakan program-programnya terkendala dengan berbagai hal diantaranya adalah terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah. Disisi lain, perusahaan melalui program CSR-nya dapat membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun bantuan pendanaan dari program CSR tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemerintah. Bantuan pendanaan dari program CSR hanya merupakan pendukung bagi program pemerintah.

Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini telah menjadi perilaku yang umum di Indonesia namun belum seluruh perusahaan

menerapkannya. Tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) semakin besar, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi selayaknya standar ISO (internasional Organization For Standardization) yang merupakan suatu lembaga internasional khusus dalam hal perumusan atau standar perumusan. Pada akhir 2009 telah diluncurkan ISO 26000 on Social Responsibility, yang memberikan pedoman bagi organisasi dan bisnis tentang cara beroperasi dengan bertanggung jawab secara sosial, sehingga tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas akan pentingnya program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan perusahaan untuk keberlanjutan dari perusahaan tersebut.

Ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan isu Corporate Social Responsibility (CSR) sejalan dengan operasi usahannya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat sehingga wajar apabila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat, kedua kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. (Asy'ari, 2009).

Komponen utama Corporate Social Responsibility (CSR) adalah pengembangan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci

pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang berpihak kepada kelompok miskin. Dunia bisnis dapat memberikan kontribusi penting dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas. Perusahaan juga dapat memberikan dampak yang kritis terhadap proses pemberdayaan melalui peningkatan standar pengembangan pendidikan dalam perusahaan. Dengan demikian, kemajuan dunia pendidikan memang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga perlu ada kerja sama antara perusahaan dan sekolah, yang dikemas melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Salah satu tujuan diselenggarakannya sistem pendidikan yaitu untuk memajukan kecerdasan karena ketika kecerdasan masyarakat telah dimajukan maka dengan sendirinya kesejahteraan juga akan ikut dimajukan. Hal ini disebabkan oleh berbeda-bedanya didalam mengukur kesejahteraan dan salah satu cara melihat kesejahteraan yaitu dengan melihat klasifikasi pendidikan maupun angka buta aksara.

Arah kebijakan pendidikan di Indonesia menurut UU/20/2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu mengupayakan perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan. Masyarakat diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan semenjak berusia tujuh sampai lima belas tahun hal ini dijelaskan dalam UU/20/2003 tentang sistem pendidikan Nasional pada pasal 6 aturan ini diadakan karena kehendak UUD NKRI 45

pasal 31 yang menyebutkan bahwa selain masyarakat wajib mendapatkan pendidikan, pemerintah juga wajib membiayainya agar tercipta sebuah sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia masyarakat.

Unsur-unsur dari Corporate Social Responsibility (CSR). Yang ada terdiri dari 3 "bottom line" diantaranya aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ke tiga aspek Corporate Social Responsibility (CSR), tersebut akan memiliki dampak bagi masyarakat sekitar perusahaan, di mana setiap program yang dijalankan hendaknya mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar sehingga perusahaan dapat menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR). Kedalam tiga aspek tersebut di Indonesia, terdapat perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam bidang pendidikan, diantaranya seperti PT. Freeport Indonesia (PTFI), PT. Pertamina dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dapat menjalin keterikatan yang baik dengan sekolah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga menunjang kelangsungan pendidikan.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Corporate Social Responsibility (CSR)". Hal ini mengindikasikan bahwa semua perusahaan

pada hakikatnya diwajibkan untuk menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR).Setiap perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat berkaitan dengan pendidikan.

Hal ini dilatar belakangi keluarnya peraturan daerah kota Makassar No. 2 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka perlu menetapkan peraturan Walikota tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah kota Makassar No. 2 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, setiap perusahaan yang beraktifitas di Daerah dan memiliki kinerja keuangan yang baik wajib melaksanakan program TSLP (pasal 15).

PT. Pelabuhan Indonesia IV Makassar atau Pelindo IV adalah badan usaha milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan. Pelabuhan ini didirikan pada 1 Desember 1992 dengan nama PT Pelabuhan Indonesia IV (persero). PT. Pelindo IV berkomitmen untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah di lingkungan Perusahaan, dengan menunjukkan perilaku bersahabat dengan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Kemudian komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan Pengelolaan dana CSR yang kemudian dana tersebut akan diberikan kepada sekolah sehingga terlaksana kegiatan dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR).

Wilayah kerja dari PT. Pelindo IV (Persero) mencakup wilayah Indonesia Bagian Timur, yang meliputi wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Ditengah situasi masyarakat kota Makassar menurut kepala dinas pendidikan kota Makassar Rahman Bando menyebut mutu pendidikan di kota Makassar menempati urutan ketiga di Sulawesi Selatan. Rahman pun mengeluhkan anggaran pembangunan ruang kelas yang menurutnya terbilang kecil dan layanan pendidikan yang tak memenuhi standar. (<https://makassar.terkini.id/mutu-pondidikan-kota-Makassar-urutan-3-terendah-disulsel/>).

Berbagai ketimpangan pendidikan di tengah-tengah masyarakat telah terjadi, antaranya adalah; a) ketimpangan antara kualitas output pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan; b) ketimpangan kualitas pendidikan antara desa dan kota, antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Selain faktor paradigma pendidikan nasional yang memisahkan peran agama dari kehidupan, mahalny biaya pendidikan dan terbatasnya sarana prasaran pendidikan juga merupakan penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia (zamroni 2009) (dalam Retno S.H. Mulyandari, 2010; 43).

Langka taktis yang diambil pemerintah di dalam bidang pendidikan yaitu dengan adanya program wajib belajar Sembilan tahun yang berarti seluruh anak di Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan dasar sampai

menengah. Diharapkan dengan adanya program ini mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah agar tidak ada lagi anak-anak yang harus putus sekolah.

Pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Indonesia, namun pada saat ini partisipasi pemerintah dirasa belum menjanjikan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas yang sama. Hal ini dapat terlihat dari kesenjangan antara pendidikan di kota-kota besar dan didaerah yang belum merata, sehingga dengan adanya bantuan dari perusahaan-perusahaan maka prasarana dalam kegiatan pendidikan dapat ditingkatkan. Biaya pendidikan di Indonesia saat ini sudah tidak dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat, namun harus disadari masih terdapat kebutuhan-kebutuhan lain untuk kegiatan pendidikan seperti keperluan akan seragam sekolah, peralatan tulis, transportasi, dan sebagainya yang belum terpenuhi seluruhnya oleh pemerintah. Di sinilah perusahaan harus memberikan kontribusinya yang secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

*Corporate Social Responsibility* atau CSR adalah salah satu wujud kepedulian PT. Pelindo IV (Persero) terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, pelindo IV sebagai perusahaan pengelola pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) selalu menyisihkan dan



perusahaan untuk anggaran CSR yang kebanyakan disalurkan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL/CSR) sejak tahun 1992. Sejak tahun 1992 sampai sekarang, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL/CSR) pada tahun 2019 total penyaluran dana PKBL sebesar Rp. 15,78 Miliar, program kemitraan yaitu sebesar Rp. 10.75 Miliar menyalurkan bantuan kepada UKM secara klaster dengan jenis usaha di bidang perikanan, peternakan, pertanian dan rumput laut sedangkan Program Bina Lingkungan sebesar Rp. 5,03 Miliar rata-rata menyalurkan bantuan untuk sarana pendidikan, sarana ibadah serta sarana dan prasarana umum lainnya. Menurut *pak Supriadi Rahmat sebagai Asisten Senior Pelaksana Bidang PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar* dana untuk program bantuan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2019 sebesar Rp. 42.500. 000;

Program CSR yang banyak dipilih oleh perusahaan yaitu CSR dibidang pendidikan. Ada beberapa perusahaan besar di Indonesia yang memfokuskan program CSRnya di bidang pendidikan. Hal ini di karenakan pendidikan merupakan hal yang penting untuk membangun suatu bangsa dengan pendidikan yang baik. Maka masa depan Negara dapat menjadi lebih baik. Kegiatan CSR yang dilakukan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV, menyediakan Beasiswa bagi pelajar yang

memiliki prestasi naik di bidang akademik dan memberikan Fasilitas dan sarana sekolah serta bantuan perlengkapan untuk siswa SD dan SMP.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ***“Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Melalui Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada Alokasi Bantuan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kota Makassar.”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan program pendidikan melalui dana corporate social responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar pada bantuan pendidikan dasar sembilan tahun?
2. Bagaimana hasil implementasi program pendidikan melalui dana corporate social responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar pada bantuan pendidikan dasar sembilan tahun?

### **3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program pendidikan melalui dana corporate social responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar pada bantuan pendidikan dasar sembilan tahun.
2. Untuk mengetahui hasil implementasi program pendidikan melalui dana corporate social responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar pada bantuan pendidikan dasar sembilan tahun.

### **4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai Kebijakan pengelolaan dana CSR khususnya pada badan usaha yang berbentuk BUMN.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai suatu bahan informasi, pertimbangan demi menghasilkan kebijakan dan program CSR yang lebih baik dimasa mendatang.

Sebagai bahan kajian bagi para peneliti yang dapat mengambil poin-poin pembelajaran dari penelitian ini dan diharapkan wacana tentang CSR ini berkembang menjadi lebih baik.

## 3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar. Selain itu juga merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister di bidang Administrasi Publik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua ini berisi definisi dan teori yang digunakan sebagai rujukan berfikir dan analisis. Secara garis besar tinjauan pustaka menguraikan definisi dan teori mengenai implementasi kebijakan program pendidikan melalui dana corporate social responsibility (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) pada Alokasi bantuan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kota Makassar.

#### **A. Definisi Kebijakan Publik**

##### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

Pada dasarnya banyak sekali pengertian tentang kebijakan, hal ini tergantung dari kebutuhan para ahli memandangnya. Kebijakan pada hakikatnya dibuat untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan pemerintah yang semakin kompleks. Dengan melewati proses usulan, perumusan, dan legitimasi sebuah kebijakan pada akhirnya dapat dihasilkan, untuk selanjutnya diputuskan dan dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Kebijakan publik merupakan keputusan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga masalah publik dapat ditangani berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu

tindakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Winarno, 2008: 15), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Graycar (dalam Keban, 2005:59), melihat kebijakan sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai suatu kerangka kerja. Berikut penjelasan masing-masing konsep tersebut.

- a. Kebijakan sebagai konsep filosofis, bahwa kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan.
- b. Kebijakan sebagai suatu produk, bahwa kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan dan rekomendasi.
- c. Kebijakan sebagai suatu proses, bahwa kebijakan dipandang sebagai cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya.
- d. Kebijakan sebagai kerangka kerja, bahwa kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu implementasi dan metode implementasi.

Easton (1969) menyebutkan kebijakan publik sebagai suatu proses *management*, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi (Tangkilisan, 2003).

Carl J. Friedrich (dalam Lubis, 2007:7) mendefinisikan “kebijakan sebagai serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan mengajukan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat tiga hal pokok dalam suatu kebijakan, yaitu: a) tujuan (*goal*), b) sasaran (*objective*), dan c) kehendak (*purpose*).

Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat

ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Kemudian kebijakan publik menurut Eyestone (2004) dalam Wahab (2012) adalah "*the relationship of governmenta unit to ist environment*" (hubungan yang berlangsung di antara unit/suatu pemerintahan dengan lingkungannya). Chandler dan Plano menyebutkan kebijakan publik adalah pemanfaatan strategi terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan berbagai permasalahan pemerintah. Bahkan lebih rinci Chandler dan Plano memiliki anggapan bahwa: kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang *continue* oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat, agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam sistem pemerintahan (Pasolong, 2013)

Anderson (dalam arifin 2015:21), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah, selanjutnya Anderson mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prodensial. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.



Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Memahami konsepsi kebijakan menjelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan yakni:
  - a. Ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari pada keputusan.
  - b. Pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan.
  - c. Kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan klasik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara *top-down* dengan *bottom-up* menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistis.

3. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan Negara ialah perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokkan antara perilaku senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang sengaja (*deliberate decisions not to act*). ketiadaan keputusan tersebut meliputi juga keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja menciptakan atau memperkokoh kendala agar konflik kebijakan tidak pernah tersingkap dimata publik.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pulan kiranya meneliti cermat baik hasil yang diharapkan ataupun hasil senyatanya dicapai. Hal ini dikarenakan, upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak diharapkan (*unintended results*) jelas tidak akan dapat menggambarkan praktik kebijakan yang sebenarnya.

6. Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau implisit. Umumnya, dalam suatu kebijakan sudah termaktup tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sebagian.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan stastis. Artinya setelah kebijakan tertentu dirumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan, akan memunculkan umpan balik dan seterusnya.
8. Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan Ini memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya dtetapkan oleh dan melibatakan suatu organisasi, tetapi tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi yang setiap harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks.
9. Kebijakan Negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif. Terhadap kekaburan antara sektor publik dengan sektor swasta, disini perlu ditegaskan bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusanya di proses, atau setidaknya

disahkan atau diratifikasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan Negara.

10. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Hal ini berarti pengertian yang termasuk dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Jones (dalam arifin 2015:24) bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Menurut Isworo (1996:229) proses kebijakan publik terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah yang akan mengarah pada permintaan untuk mengatasi masalah tersebut.
2. Formulasi kebijakan berupa langkah yang dilakukan setelah pemilihan alternative.
3. Legitimasi dari kebijakan.
4. Implemntasi.

5. Evaluasi melalui berbagai sumber untuk melihat sejauh mana usaha pencapaian tujuan.

Menurut Richard Rose yang dikutip oleh W. Dunn (dalam Keenan, 2008:60) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (issue areas) yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik diantara kelompok masyarakat. Konsep ini melihat kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Menurut Robert Eyestone (dalam Winarno; 2002: 12), kebijakan publik didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus administrasi publik Chandler dan Plano (1998:107) yang dikutip Herbani Pasolong dalam teori administrasi publik (2008:38), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber data yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Kebijakan publik disebutkan oleh Laswell dan Kaplan sebagai suatu program yang dapat diproyeksikan pada tujuan, nilai, dan praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*). (Nugroho, 2012).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka kebijakan publik dapat dikatakan sebagai tindakan pemerintah dalam hal mengelola dan menata Negara tanpa mengenyampingkan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat serta berdasarkan pada prinsip-prinsip peraturan yang ada.

## **2. Proses Pembuat Kebijakan Publik**

Proses analisi kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. (William N.Dunn, 1999: 22-24).

Tabel 2.1

**Tahap-Tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan**

<b>FASE</b>	<b>KARAKTERISTIK</b>	<b>ILUSTRASI</b>
PENYUSUSNAN AGENDA	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda public. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.	Legislator Negara dan kosponsornya menyiapkan undang-undang mengirimkan ke komisi kesehatan dan kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti dikomite dan tidak terpilih.
FORMULASI KEBIJAKAN	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislative	Peradilan Negara bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas.
ADOPSI KEBIJAKAN	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.	Dalam keputusan mahkama agung pada kasus <i>roe v wade</i> tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial	Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status

	dan manusia.	pengecualian pajak.
PENILAIAN KEBIJAKAN	Unit-unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif,legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.	Kantor akuntansi publik memantau program program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi.

Sumber: Pengantar Analisi Kebijakan Publik (William N.Dunn. 1999)

## B. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik hanya dapat diketahui manfaatnya ketika kebijakan tersebut dilaksanakan. Implementasi merupakan cara agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan para pihak berkepentingan (*stakeholders*) dalam bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan tahapan aktivitas, kegiatan, program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat atau swasta (Nugroho,2014).Penerapan suatu kebijakan akan melibatkan beraneka macam kegiatan seperti menyampaikan dan menekan pengarahan, mengeluarkan dana, pembentukan satuan organisasi, satuan birokrasi pemerintah dan bahkan melibatkan daerah atau Negara lain, hal ini sesuai



dikemukakan oleh Jones (1984:164-166) menyebutkan bahwa ada tiga aktivitas utama dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Organisasi: pembentukan atau penataan kembali sumber-daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
2. Interpretasi: menafsirkan agar, program (umumnya dalam status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan pembayaran atau hal lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Jadi Implementasi kebijakan bersifat kompleks, tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan tidak akan mewakili seluruh kelompok yang ada dalam masyarakat. Sejalan dengan definisi implementasi kebijakan yang dikemukakan, maka jelaslah bahwa mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan Negara atau daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya adalah pihak-pihak pemerintah sendiri dengan pihak-kelompok-kelompok atau individu yang berkepentingan yang ada dalam masyarakat dimana kebijakan itu di implementasikan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

## 1. Model Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan yaitu:

### 1. Teori George C. Edward

Menurut George Edward III terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, faktor tersebut meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi (Widodo, 2010). Keempat faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apayang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. (Subarsono, 2011). George c. Edward III membahas tiga hal yang utama dalam proses komunikasi kebijakan (Winarno, 2012) yaitu:
  - a. Transmisi: pelaksanaan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Komunikasi yang disampaikan harus akurat dan mudah dimengerti tentang apa yang menjadi tujuan dan sasaran atau target.
  - b. Kejelasan: jika kebijakan diimplemntasikan sebagai yang diinginkan, makan petunjuk pelaksanaan tidak hanya

diperoleh oleh para pelaksana, tetapi komunikasi harus jelas. Ketidakjelasan komunikasi berdampak pada implementasi kebijakan dan akan menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi bahkan bertentangan dengan makna pesan awal.

- c. Konsistensi komunikasi yang disampaikan harus konsisten dan jelas sehingga perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan kepada kelompok sasaran tetapi jika perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Sumberdaya, isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. (Subarsono, 2011).

a. Staf

Sumber daya utama dalam implemetasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implemetasi salah satunya disebabkan oleh karena staf yang dimiliki tidak mencukupi, memadai atau tidak kompeten

dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan kecukupan staf dan keahlian dan kemampuan yang diperlukan didalam mengimplementasikan kebijakan.

b. Informasi

Informasi adalah sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan ataupun pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan.

c. Kewenangan

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah di dalamnya dapat dilaksanakan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Kewenangan berkaitan dengan hal yang diamanatkan oleh kebijakan.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah semua yang tersedia dalam menunjang pengimplementasian agar terselenggara suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. (Subarsono, 2011).
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. (Winarno, 2012).

## 2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2008). Di pengaruhi oleh dua Variabel besar, yakni isi kebijakan (Content Of Policy) dan lingkungan implementasi (Context Of Implementation).

Variabel isi kebijakan ini mencakup;

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan;

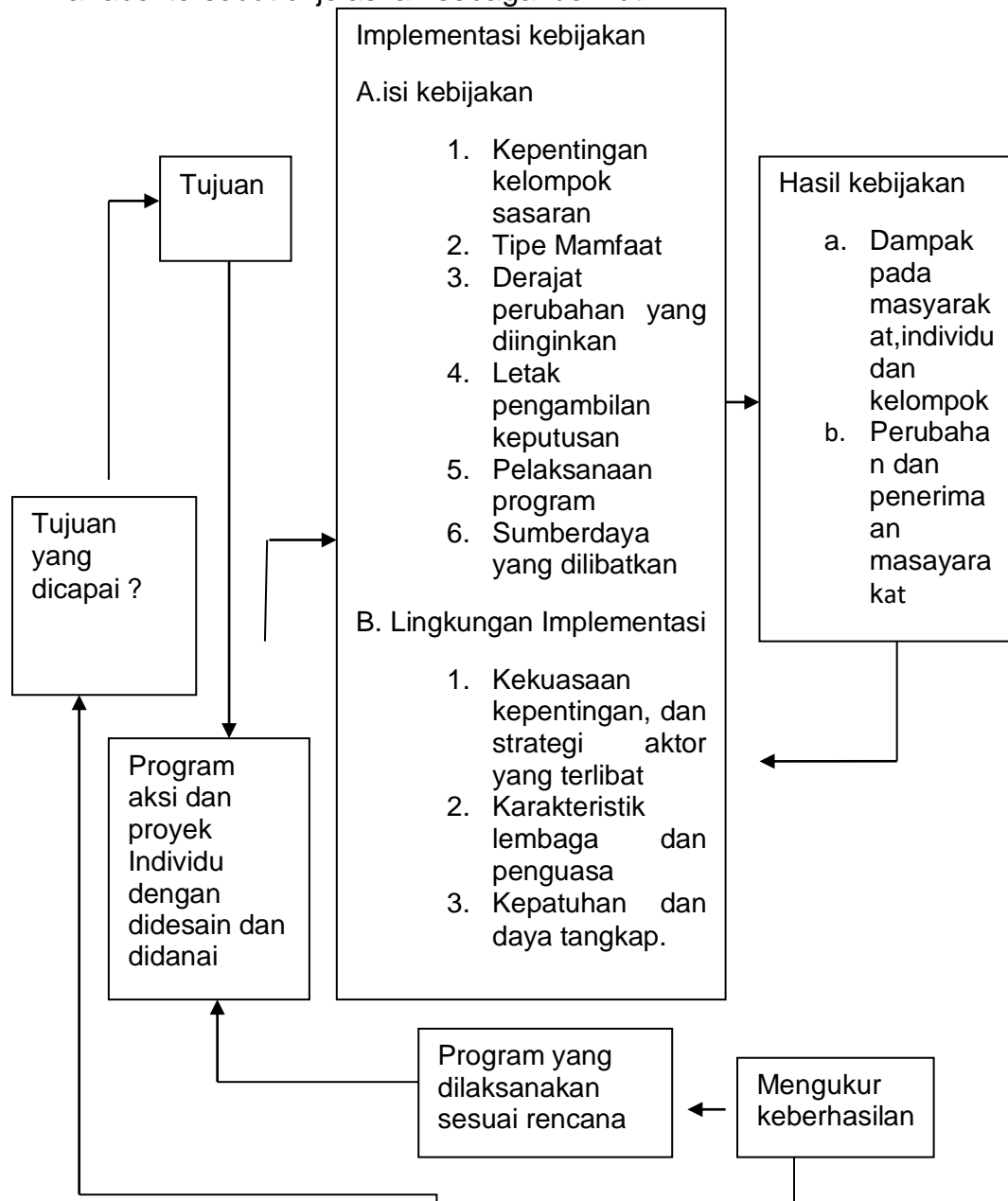
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat diwilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan dari pada menerima program kredit sepeda motor.
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat, misalnya, ketika BKKBK memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan dana kepada keluarga prasejahtera, banyak orang menanyakan apakah letak program ini sudah tepat berada di BKKBN.
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

- b. Karakteristik intitusi dan rezim yang sedang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Variabel tersebut di jelaskan sebagai berikut:



Sumber: Implementasi Kebijakan Menurut (Merilee S. Grindle. 1980)



## 1. Isi Kebijakan

### a. *Interest affected* (kepentingan yang mempengaruhi).

*Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Indikator ini menyatakan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang dikaji lebih lanjut.

### b. *Type of benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* (isi kebijakan) berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan serta memberikan gambaran bahwa dalam suatu kebijakan harus memiliki beberapa jenis manfaat serta dapat menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

### c. *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* (isi kebijakan) poin ini menjelaskan bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

### d. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam implementasi suatu kebijakan, sehingga

bagian ini mengharuskan penjelasan tentang letak pengambilan keputusan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat dan sesuai dengan kebijakan.

e. *Program implementer* (pelaksana program)

Menjalankan suatu kebijakan atau program tidak hanya membutuhkan kejelasan program tapi harus juga didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

f. *Resources committed* (sumber daya yang digunakan)

Sebuah program harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan membutuhkan sumber daya manusia maupun finansial yang sesuai.

2. Lingkungan implementasi (*context of implementation*)

a. *Power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

b. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa).

Lingkungan mempengaruhi kebijakan yang dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon para pelaksana, maka pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan.

### 3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2011) terdapat tiga kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

1. Karakteristik masalah (*Tranctability of the problems*), Meliputi:
  - a. Tingkat kesulitan teknis masalah yang bersangkutan
  - b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran
  - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
  - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

2. Karakteristik Kebijakan (*Ability of statute to structure implementation*), meliputi:

- a. Kejelasan isi mengenai kebijakan.
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
- c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan.
- d. Seberapa besar keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksanaan.
- e. Kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana.
- f. Tingkat komitmen aparat mengenai tujuan kebijakan.
- g. Seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Variabel Lingkungan (*Nonstatutory Variables affecting implementation*), meliputi:

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
- b. Dukungan publik mengenai sebuah kebijakan
- c. Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*)
- d. Tingkat komitmen dan keterampilan aparat dan implementor.

#### **4. Teori Donal S. Van Mater dan Carl E Van**

Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2011) ada enam variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi

antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor.

Keenam variabel tersebut dijelaskan Oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Implementasi kebijakan hanya dapat diukur apa bila ukuran dan tujuan kebijakan sesuai dengan kemampuan level pelaksana sehingga kebijakan tidak sulit untuk dilaksanakan. Aktualisasi kebijakan disebut sesuai jika ukuran dan tujuan kebijakan sesuai dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan terlalu ideal atau utopis maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik tersebut.
2. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Implementasi kebijakan hanya dapat diukur apa bila ukuran dan tujuan kebijakan sesuai dengan kemampuan level pelaksana sehingga kebijakan tidak sulit untuk dilaksanakan. Aktualisasi kebijakan disebut sesuai jika ukuran dan tujuan kebijakan sesuai dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan terlalu ideal atau utopis maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik tersebut.
3. Karakteristik Agen Pelaksana. Fokus perhatian agen pelaksana terletak pada organisasi formal maupun informal yang meliputi

karakteristik, pola dan hubungan di dalam organisasi tersebut karena kinerja implementasi dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Pelaksana. Hal ini menjadi penting karena proses perumusan kebijakan bukan merupakan formulasi yang disepakati oleh masyarakat yang mengetahui tentang permasalahan yang terjadi akan tetapi seringkali kebijakan yang ada bersifat *top-down* sehingga dapat menimbulkan penolakan. Tanggapan pelaksana yang berpotensi dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.
5. Komunikasi Antar Organisasi. Koordinasi sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi yang terlibat di dalam proses implementasi. Koordinasi merupakan tindakan komunikatif yang dilakukan antar organisasi sehingga menjadi mekanisme yang ampuh di dalam implementasi kebijakan publik. Semakin sering dilakukan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat pada proses implementasi, maka akan mengurangi dan menetralsir berbagai kemungkinan kesalahan yang dapat ditimbulkan dan begitu pula sebaliknya. Hubungan antar organisasi

dapat dilaksanakan dengan memberikan masukan dan bantuan teknis antar organisasi serta membuat kesepakatan yang didasari atas kebijakan yang dapat menghasilkan sanksi positif atau negatif.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal ini merupakan pengaruh-pengaruh lingkungan eksternal yang dapat mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn menawarkan sejauhmana lingkungan eksternal dapat mendorong dan membantu keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan, yang diperhatikan adalah kondisi lingkungan eksternal. Hipotesis yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik pada organisasi pelaksana dapat memberikan pengaruh terhadap karakter badan-badan pelaksana, kecenderungan perilaku para pelaksana dan pencapaian itu sendiri (Agustino, 2008).

### **C. Corporate Social Responsibility (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* menurut bahasa diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan untuk penjabaran peraturan tersebut. Dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai:

*“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”*

Pendapat lain diberikan oleh Nuryana (2005) (Meutia, Vol. 2 No 2 2012:132) menurutnya, CSR sendiri adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis perusahaan dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Dari definisi di atas, ditekankan bahwa Perseroan wajib ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang sifatnya berkelanjutan di masyarakat. Hal tersebut demi meningkatkan kualitas Perseroan itu sendiri maupun komunitas dan masyarakat pada umumnya.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan para *stakeholder* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku (Wahyudi dan Azheri, 2008:36).



Johnson and Johnson (2006) dalam bukunya yang berjudul *Culture and Corporate Governance Social Responsibility* mendefinisikan “Corporate Social Responsibility” pada dasarnya berangkat dari filososofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu perusahaan harus mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Crane, dkk (2008) dalam bukunya yang berjudul *Corporate Social Responsibility* menyatakan bahwa CSR berarti perusahaan melakukan internalisasi-eksternalitas dalam kegiatan usahanya. Eksternalitas adalah dampak positif dan negatif aktivitas perusahaan yang ditanggung oleh pihak lain, namun tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga tidak tercermin dalam harga produk. Seluruh pakar CSR tidak bisa menerima adanya perusahaan yang mengaku ber-CSR namun tidak melakukan manajemen yang optimal atas eksternalitas. Konsekuensinya, apabila perusahaan hendak dianggap berkinerja sosial yang tinggi, ia berturut-turut harus memastikan tiga hal berikut: dampak negatifnya telah ditekan hingga seminimal mungkin, dampak residual (dampak negatif yang masih tersisa setelah ditekan) telah dikompensasi dengan proporsional, dan dampak positifnya telah dikelola semaksimal mungkin. Pemahaman ini didukung oleh Jalal (Aktivis Lingkar Studi CSR, Senior Associate di Kiroyan

Partners) bahwa CSR adalah manajemen dampak. CSR terutama berkaitan dengan bagaimana keuntungan dibuat oleh perusahaan, bukan sekadar berapa dan kepada siapa keuntungan itu disebar. Citra positif adalah hasil menjalankan CSR dalam jangka panjang, namun citra bukanlah tujuan menjalankan CSR itu sendiri.

McWilliams dan Siegel (Mursitama, 2011:23) mendefinisikan CSR sebagai serangkaian tindakan perusahaan yang muncul untuk meningkatkan produk sosialnya, memperluas jangkauan melebihi kepentingan ekonomi eksplisit perusahaan. Sedangkan pengertian lain diberikan oleh Rangkuti (2009:187) mengatakan bahwa CSR tidak lagi merupakan biaya sosial yang harus dikeluarkan perusahaan, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk meningkatkan publisitas perusahaan.

*“Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan” Hendrik Budi, (2008:1)“.

Menurut Lako (2011:5-6) CSR merupakan kewajiban asasi perusahaan yang tidak boleh dihindari. Dasar argumentasinya adalah bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkan baik

sengaja maupun tidak sengaja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Definisi lain diberikan oleh Davis dan Frederick (Wahyudi dan Azheri, 2008:35) menyatakan bahwa CSR adalah sebagai kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di samping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Selanjutnya Keith Davis (Solihin, 2011:16) memberikan rumusan tanggung jawab sosial sebagai berikut: “*businessmen’s decisions and action taken for reasons at the least partially beyond the firm’s direct economic or technical interest*”.

Definisi diatas menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

John Elkington dalam Hardiansyah (2008) merumuskan Konsep *Triple Bottom Lines* (TBL) atau tiga fokus utama perusahaan dalam beroperasi, yaitu sosial (masyarakat), ekonomi dan lingkungan. Kebijakan CSR adalah

kerangka dasar perusahaan berupa dokumen tertulis sebagai acuan peguna mencapai tujuan perusahaan. Kebijakan tersebut dapat dilihat dari visi, misi, moto serta tujuan perusahaan berdasarkan prinsip *triple bottom line* (*profit, people, planet – 3P*).

- a. *Profit* (keuntungan) merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama setiap kegiatan usaha. Maka dari itu setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan agar dapat meningkatkan profit. Sedangkan yang dapat dilakukan guna untuk meningkatkan profit adalah dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi anggaran.
- b. *People* (masyarakat) dalam hal ini masyarakat sekitar perusahaan. Mengapa masyarakat dianggap penting? Karena tanpa dukungan dari masyarakat sekitar maka kegiatan dari perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan pada akhirnya akan memengaruhi profit (keuntungan) yang diperoleh perusahaan.
- c. *Planet* (lingkungan) adalah unsur yang tak kalah pentingnya, setiap kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan juga harus memperhatikan keberadaan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi tidak sedikit pula perusahaan yang beranggapan bahwa pelestarian lingkungan sekitar bukan hak pokok karena tidak berdampak langsung pada peningkatan profit (keuntungan).

Ketiga hal ini berkaitan satu sama lain. Masyarakat tergantung pada ekonomi, dan ekonomi tergantung pada masyarakat dan lingkungan, bahkan ekosistem global. Ketiga komponen TBL ini tidaklah stabil, melainkan dinamis tergantung kondisi dan tekanan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan, serta kemungkinan konflik kepentingan. TBL digunakan sebagai kerangka atau formula untuk mengukur dan melaporkan kinerja mencakup parameter-parameter ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memperhatikan kebutuhan *stakeholders* serta *shareholders* guna meminimalkan kerusakan pada manusia dan lingkungan dari aktivitas (Wibisono, 2007).

Menurut Saidi dan Abidin (2004) yang dikutip dalam Adjie dan Roekhudin (2012) sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan di Indonesia, yaitu:

- a. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
- b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
- c. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-

pemerintahan, instansi pemerintahan, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

- d. Mendukung atau bergabung dalam konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara proaktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

#### **1. Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR)**

*Corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan komitmen perusahaan untuk membagikan sebagian dari keuntungan kepada masyarakat dalam bentuk perhatian berupa pembuatan program-program perusahaan dalam rangka memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan dapat menambah pendapatan masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan *image* positif di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya merupakan suatu investasi jangka panjang bagi Perusahaan sehingga

diharapkan tujuan perusahaan yaitu meningkatkan pendapatan dapat tercapai.

Tujuan *Corporate Social Responsibility* yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 yaitu untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Di dalam penjelasan Pasal 15 b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tujuan *corporate social responsibility* yaitu untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan tujuan yang dapat diperoleh dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan penjelasan Pasal 15 b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, nampak bahwa tujuan *corporate social responsibility* juga memiliki keterkaitan dengan tujuan negara yang di antaranya adalah

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

*Corporate social responsibility* merupakan usaha yang membawa dampak positif kepada perusahaan jangka panjang. Jangka panjang yang dimaksud adalah usaha dari suatu perusahaan akan lebih lestari atau berkesinambungan karena pekerjanya memperoleh kesejahteraan dan betah untuk bekerja pada perusahaan, sehingga proses produksi dapat menghasilkan mutu kualitas yang memuaskan. Pada sisi lain, lingkungan di sekitar perusahaan seperti masyarakat otomatis juga akan terjaga, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif pada perusahaan seperti munculnya dukungan dari masyarakat kepada perusahaan dan pemberian nama baik dari masyarakat, sehingga keuntungan atau laba dari perusahaan akan tetap terjaga Wibisono (2007:37). Anggapan bahwa *corporate socialresponsibility* adalah beban bagi perusahaan tidaklah tepat, karena penerapan *corporate social responsibility* akan membawa dampak positif yang merupakan investasi jangka panjang perusahaan.

## **2. Bentuk- Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* memiliki bentuk-bentuk di antaranya yang menjadi pondasi dasar yaitu: *Charity Principle* dan *Stewardship Principle*. *Charity Principle* adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan bantuan sukarela kepada



seseorang atau kelompok yang membutuhkan. Kegiatan ini biasanya dalam bentuk kegiatan karitatif. *Stewardship Principle* adalah tindakan perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan setiap pihak yang dipengaruhi oleh keputusan maupun kebijakan perusahaan Widjaja (2008:114). Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena adanya kesadaran bahwa adanya ketergantungan perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam bentuk ini, dapat menguntungkan kedua belah pihak, karena selain *stakeholders* dapat tercukupi kepentingannya, perusahaan pun juga memperoleh keuntungan berupa penilaian positif masyarakat terhadap perusahaan yang berdampak pada kepercayaan yang diberikan masyarakat bagi perusahaan dan produk yang dihasilkan Busyra dan Isya (2008:70). Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di luar inti bisnis, memiliki banyak bentuk antara lain:

- a. *Corporate Philanthropy* yaitu pemberian sumbangan sebagai kegiatan amal / kedermawanan (*charity*) yang dapat berupa hibah tunai, atau dalam bentuk barang. Konsep ini merupakan konsep yang paling tua diantara konsep-konsep yang lain (Lee, Nancy dan Philip Kotler, (2010:23-24) dan berkembang kearah pemberdayaan masyarakat yang lebih dikenal dengan *Community Development*, contohnya, pengembangan kerjasama,

memberikan ketrampilan, pembukaan akses pasar dan sebagainya.

- b. *Cause Promotions* yaitu pengalokasian dana atau bantuan dalam bentuk barang dan sumber daya lain oleh perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian tentang masalah sosial atau dalam rangka rekrutmen sukarelawan. Contohnya, *TheBody Shop* mempromosikan larangan penggunaan hewan untuk uji coba produk kosmetik.
- c. *Corporate Social Marketing* yaitu upaya perusahaan dalam memberi dukungan pada pembangunan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku dalam rangka memperbaiki kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan dan lain-lain.
- d. *Social Responsible Business Practice* yaitu pengapdosian dan pelaksanaan praktek-praktek bisnis dan investasi yang memberikan dukungan pada permasalahan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk melindungi lingkungan.

### **3. Model- Model Corporate Social Responsibility (CSR)**

Terdapat empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia (Nirmana, Vol 8 No 2, 2006:96), yaitu:

- a. Keterlibatan langsung

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini biasanya perusahaan menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.

b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

c. Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non pemerintah (Ornop), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat "hibah pembangunan"

pihak konsorium atau lembaga semacam itu yang dipercayai perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari menentukan populasi atau kelompok sasaran, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok sasaran, merancang program kegiatan dan cara-cara pelaksanaannya, menentukan sumber pendanaan, menentukan dan mengajak pihak-pihak yang akan dilibatkan, melaksanakan kegiatan atau mengimplementasikan program, hingga memonitor dan mengevaluasi kebijakan.

Agar berkelanjutan, pemberdayaan jangan hanya berpusat pada komunitas lokal, melainkan pula pada sistem sosial yang lebih luas termasuk kebijakan sosial.

#### **4. Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)**

Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini agar pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan dengan *stakeholders* yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah

kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi, dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga *stakeholders*. Bila CSR mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan.

Manfaat penerapan CSR diuraikan (Untung, 2008:6), yaitu:

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara social.
- c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

- j. Peluang mendapatkan penghargaan.

## 5. Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)

Ranah tanggung jawab sosial (*social responsibility*) mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggung jawab sosial (*social responsibility*) juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Untuk itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggaris bawahi dasar yang terkandung dalam tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Crowther David (Hadi, 2011:59) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*social responsibility*) menjadi tiga, yaitu: (1) *sustainability*; (2) *accountability*; dan (3) *transparency*.

- a. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang. *Sustainability therefore implies that society must use no more than*

*can be regenerated. This can be defined in term of the carrying capacity of the ecosystem.*

- b. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun *image* dan *network* terhadap para pemangku kepentingan.
- c. *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. David (Hadi, 2011:60) Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggung jawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Sedangkan menurut Wibisono (2007), terdapat 2 (dua) model atau pola CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR, antara lain:

- a. Self managing Pola keterlibatan secara langsung dan melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Kelebihannya adalah pelaksanaan

kegiatan lebih sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, lebih mudah di kontrol dan di monitor, lebih efisien untuk kegiatan jangka pendek, dan perusahaan dapat belajar langsung merancang program CSR. Kekurangan self managing adalah keterampilan karyawan yang umumnya masih kurang, membutuhkan sumber daya khusus dengan jumlah yang cukup dan berpotensi pada pembengkakan anggaran.

- b. Outsourcing Outsourcing memiliki dua pola. Pola pertama adalah bermitra dengan pihak lain, LSM, instansi pemerintah, universitas, media massa, dan sebagainya. Pola kedua dengan bergabung atau mendukung kegiatan bersama baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Kelebihan pola Outsourcing adalah perusahaan bisa memilih mitra profesional yang sesuai dengan karakter program, tidak memerlukan SDM dengan kapasitas khusus dan kinerja program dapat dengan mudah di evaluasi. Sedangkan kekurangannya yaitu anggaran yang dikeluarkan perusahaan relatif besar, seringkali perusahaan tidak dapat mengikuti perkembangan secara langsung dan diperlukan mekanisme kontrol yang baik.

## **6. Pendidikan**

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk



memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sejumlah perusahaan menetapkan kebijakan bahwa pendidikan merupakan prioritas *Corporate Social Responsibility* (CSR) mereka. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan di Asia menunjukkan *trend* demikian.

Pendidikan perlu menjadi prioritas dalam pembangunan, karena jika tidak, dikhawatirkan pada tahun-tahun ke depan bangsa kita akan menjadi “babu” di negeri sendiri karena kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Secara praktis, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dikatakan berhasil jika terdapat program nyata yang dapat ditunjukkan dari pelaksanaan program. Pada bidang pendidikan, terdapat dokumentasi yang menunjukkan berkurangnya angka buta huruf dan meningkatnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) masyarakat (Chambers (2003) dalam Nursahid (2008:20)).

Salah satu tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sangat penting, khususnya di negara sedang berkembang adalah peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Dengan demikian, penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia dapat diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil dan menengah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat

dilaksanakan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan (Mapisangka, 2009).

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian hanya bisa dilakukan apa bila terdapat penelitian terdahulu yang dapat mendukung atau menunjang pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Ada pun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Janti Gunawan, Agnes Tuti Rumiati. (2018)	CSR untuk pembangunan pendidikan berkelanjutan; Studi Kasus Solar Schools (Sekolah Energi Surya) di SMK PRAKARYA INTERNASIONAL BANDUNG	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi Kasus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kegiatan CSR sangatlah diperlukan terutama di sektor – sektor yang masih baru. Perusahaan energi terbarukan dapat menggunakan CSR mereka sebagai upaya untuk edukasi public tentang energi terbarukan dan keberlanjutannya.
2.	Kadek Desy Aprianthiny (2015)	Implementasi Corporate social Responsibility (CSR) sebagai modal sosial	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial

		pada PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi, Singaraja Bali.		perusahaannya melalui Program CSR mendapat respon dan dukungan sepenuhnya dari masyarakat dengan kegiatankegiatan yang dilakukan PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi yang bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat.
3	Ni Luh Putu Indah Trisna Dewi, Putu Sukma Kurniawan, Edy Sujana (2018)	Analisis proses penganggaran dan pengelolaan dana CSR serta dampaknya terhadap peningkatan citra perusahaan (studi kasus PT. PLN (Persero) Distribusi Bali Area Bali Utara, di Singaraja Buleleng)	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi Kasus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam memperoleh dana tentunya ada proses penganggaran dana, proses penganggaran dana CSR pada PT. PLN Distribusi Bali Area Bali Utara dengan memfokuskan pada 7 aspek yang mana program-program yang telah dianggarkan dananya oleh Kantor Pusat PLN yang dimanajemen oleh divisi CSR dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Dana CSR ini digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, PLN tidak langsung memberikan dana CSR.

## **E. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pelaksanaan Kebijakan Pengolaan (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada Alokasi Bantuan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Makassar. Maka untuk melihat implementasi kebijakan, pendekatan yang digunakan menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindel (1980), maka kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

